

Analisis Penerapan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui QRIS Dinamis Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2019-2024

Nur Intan Muhas^{1*}, Nurwahyuni², Fifi Nurafifah Ibrahim³

nurintanmuhas@gmail.com^{1*}, nurwahyuni@umi.ac.id², fifinurafifah.ibrahim@umi.ac.id³

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui QRIS dinamis dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan periode 2019–2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara bersama Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan, penyedia layanan QRIS (Bank Sulselbar) serta wajib pajak terkait penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan QRIS dinamis sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), di mana persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan mendorong adopsi teknologi oleh wajib pajak. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital masih menjadi kendala. Optimalisasi QRIS dinamis memerlukan perluasan infrastruktur, peningkatan sosialisasi, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Bapenda Sulsel; Pajak Kendaraan Bermotor; Penerimaan Pajak Daerah; QRIS Dinamis; *Technology Acceptance Model*.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pendahuluan Dalam era digital saat ini, transformasi teknologi telah menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi berbagai sistem, termasuk sistem perpajakan. Penerapan teknologi dalam sistem pembayaran pajak di Indonesia, khususnya melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), memainkan peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi perpajakan. QRIS dinamis memberikan kemudahan bagi wajib pajak

dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara cepat dan aman. Sementara itu, QRIS statis, yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019, lebih umum digunakan dengan batasan dalam hal fleksibilitas dan interaktivitas. QRIS dinamis, yang diluncurkan pada 1 November 2020, menawarkan fitur yang lebih fleksibel, di mana kode QR dihasilkan secara otomatis untuk setiap transaksi. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan, pemanfaatan teknologi ini menjadi sangat relevan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Fenomena penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan nominal transaksi yang signifikan. Data menunjukkan bahwa penggunaan QRIS meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan adopsi teknologi pembayaran digital yang semakin luas. Kemudahan akses dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem QRIS memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tanpa harus mengunjungi kantor pelayanan pajak secara langsung, yang selanjutnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena meskipun banyak inovasi teknologi yang telah diterapkan, masih ada tantangan dalam penerapan QRIS, seperti tingkat literasi digital masyarakat dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Kajian mengenai dampak penerapan QRIS dinamis terhadap penerimaan pajak daerah di Sulawesi Selatan masih minim, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami efektivitas sistem ini.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Nurul (2024) dan Sinta (2023), menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan QRIS berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak untuk bertransaksi. Penelitian oleh Indri (2024) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian tersebut berfokus pada daerah yang berbeda dan berbagai faktor yang berbeda dengan yang ada di Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertumbuhan kendaraan yang signifikan dan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui teknologi.

Kajian teori yang mendasari penelitian ini adalah Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model* atau TAM), yang menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi teknologi. TAM menekankan dua konsep utama: persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Kualitas sistem, keandalan, dan kemudahan pemeliharaan juga berperan penting dalam memengaruhi persepsi pengguna. Dengan memahami faktor-faktor ini, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas QRIS dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Metode Analisis

Bagian Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena penerapan QRIS dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Lokasi penelitian berada di Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan, yang terletak di Jl. A. P. Pettarani No. 1, Makassar. Data primer dikumpulkan

melalui wawancara dengan Wajib Pajak dan pemangku kepentingan, serta melalui teknik pengumpulan data lain seperti observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif.

Informan penelitian terdiri dari pejabat Badan Pendapatan Daerah, Wajib Pajak yang menggunakan QRIS, dan perwakilan penyedia layanan pembayaran. Pejabat Bapenda memberikan wawasan tentang kebijakan dan tantangan dalam penerimaan pajak, sementara Wajib Pajak berbagi pengalaman terkait kemudahan penggunaan QRIS. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengolah dan mendeskripsikan data yang dikumpulkan, dengan langkah-langkah yang meliputi pengumpulan, klasifikasi, dan penyajian data sesuai dengan teori yang relevan. Hasil analisis ini diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas QRIS dinamis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan.

Hasil

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan enam narasumber yang memberikan wawasan beragam mengenai penerapan sistem QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Narasumber terdiri dari perwakilan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Bank Sulselbar, serta Wajib Pajak yang telah dan belum menggunakan QRIS. Pembagian sudut pandang ini bertujuan untuk memahami dampak dan tantangan dalam implementasi QRIS dari berbagai perspektif.

Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan

Narasumber dari Bapenda, "IS," menjelaskan bahwa latar belakang implementasi QRIS adalah untuk mempercepat pelayanan pembayaran pajak dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Ia mencatat bahwa QRIS dinamis diluncurkan pada 9 Desember 2022, setelah sebelumnya QRIS statis diperkenalkan pada tahun 2020. Meskipun ada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, "IS" mengakui bahwa belum ada pengukuran spesifik yang menunjukkan seberapa besar kontribusi QRIS terhadap peningkatan tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai apakah kenaikan penerimaan pajak sepenuhnya disebabkan oleh sistem QRIS atau faktor lain yang mungkin juga berkontribusi.

SEBELUM QRIS DINAMIS				
Tahun	Makassar 2		Makassar 1	
	Statis	Dinamis	Statis	Dinamis
2019	Peluncuran QRIS oleh Bank Indonesia			
2020	Rp3.190.500	Rp0	Rp0	Rp0
2021	Rp213.082.352	Rp0	Rp17.059.106	Rp0
2022	Rp936.585.005	Rp0	Rp1.262.081.075	Rp0
Total	Rp1.152.857.857	Rp0	Rp1.279.140.181	Rp0

SESUDAH QRIS DINAMIS				
Tahun	Makassar 2		Makassar ¹	
	Statis	Dinamis	Statis	Dinamis
2023	Rp2.822.066.103	Rp2.113.553.77 6	Rp5.434.012.300	Rp8.639.831.300
2024	Rp3.575.878.166	Rp4.450.976.54 0	Rp6.295.026.500	Rp12.770.903.500
TOTAL	Rp6.397.944.269	Rp6.564.530.31 6	Rp11.729.038.800	Rp21.410.734.800

Berdasarkan data penerimaan PKB di Makassar 1 dan Makassar 2 dari tahun 2019 hingga 2024, terjadi lonjakan signifikan setelah penerapan QRIS dinamis. Sebelum penerapan QRIS dinamis (2019–2022), total penerimaan di Makassar 2 mencapai Rp1.152.857.857 dan di Makassar 1 sebesar Rp1.279.140.181, keduanya hanya menggunakan QRIS statis. Namun, setelah penerapan QRIS dinamis pada tahun 2023 dan 2024, penerimaan PKB meningkat drastis. Di Makassar 2, penerimaan dari QRIS dinamis mencapai Rp2.113.553.776 pada 2023 dan melonjak menjadi Rp4.450.976.540 pada 2024. Sementara di Makassar 1, penerimaan meningkat lebih tinggi, mencapai Rp8.639.831.300 pada 2023 dan Rp12.770.903.500 pada 2024. Secara total, penerimaan dari QRIS dinamis selama dua tahun di Makassar 2 dan Makassar 1 masing-masing mencapai Rp6.564.530.316 dan Rp21.410.734.800, menunjukkan efektivitas QRIS dinamis dalam meningkatkan penerimaan PKB.

"IS" juga menyoroti bahwa meskipun ada data peningkatan penerimaan, evaluasi yang dilakukan selama ini bersifat kualitatif. Sosialisasi melalui media sosial dan kegiatan langsung di masyarakat dilakukan untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak. Namun, efektivitas sosialisasi ini belum pernah diukur secara sistematis, sehingga sulit untuk menilai dampaknya terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Bank Sulselbar (Penyedia Layanan QRIS)

Perwakilan dari Bank Sulselbar, "MN," menambahkan bahwa penggunaan QRIS bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak di era digitalisasi. Ia mencatat bahwa tantangan utama dalam implementasi QRIS adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi, yang memerlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut. Selain itu, masalah koneksi jaringan di daerah-daerah tertentu juga menjadi kendala signifikan.

"MN" menjelaskan bahwa meskipun penerimaan pajak menunjukkan peningkatan, perlu analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah peningkatan tersebut secara langsung berkaitan dengan penggunaan QRIS atau disebabkan oleh transisi dari metode tunai ke non- tunai. Dia juga mencatat bahwa kerjasama antara Bank Sulselbar, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperluas penggunaan QRIS.

Wajib Pajak yang Menggunakan QRIS

Dua Wajib Pajak yang telah menggunakan QRIS, "F" dan "MZ," memberikan perspektif positif mengenai pengalaman mereka. "F" menyatakan bahwa

penggunaan QRIS membuatnya lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak dan mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Ia merasa bahwa QRIS telah menghilangkan berbagai alasan untuk malas membayar pajak, karena sistem ini memberikan kemudahan yang tidak ditawarkan oleh metode tradisional.

Sementara itu, "MZP" menjelaskan bahwa ia memilih QRIS karena lokasinya yang jauh dari tempat pembayaran pajak. Ia merasa lebih efisien menggunakan QRIS, terutama saat tidak berada di Sulawesi Selatan. Meskipun awalnya merasa was-was mengenai keamanan, setelah melihat teman-temannya menggunakan sistem ini, "MZP" merasa lebih percaya diri berkat adanya verifikasi pembayaran dan transparansi dalam prosesnya.

Wajib Pajak yang Belum Menggunakan QRIS

Di sisi lain, Wajib Pajak yang belum menggunakan QRIS, seperti "IB" dan "I," menunjukkan ketidakpahaman mengenai sistem pembayaran ini. "IB" menganggap bahwa pembayaran pajak harus dilakukan secara langsung dan tunai, mencerminkan kebiasaan tradisional yang sulit untuk diubah. Ia merasa nyaman dengan metode konvensional dan belum mempertimbangkan alternatif digital.

Sementara itu, "I" mengakui bahwa meskipun sering menggunakan QRIS untuk belanja, ia tidak mengaitkannya dengan pembayaran pajak. Meskipun merasa puas dengan metode tunai yang digunakan saat ini, "I" menunjukkan keterbukaan untuk mencoba QRIS jika mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai sistem ini. Kedua narasumber ini menyoroti pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang QRIS.

Pembahasan

Pembahasan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sulawesi Selatan menunjukkan perubahan signifikan setelah penerapan sistem pembayaran berbasis QRIS dinamis. Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari Bapenda, Bank Sulselbar, serta Wajib Pajak yang menggunakan dan tidak menggunakan QRIS, ditemukan bahwa meskipun QRIS statis telah diterapkan sejak 2020 dan menunjukkan peningkatan penerimaan, peluncuran QRIS dinamis pada akhir 2022 memberikan dampak yang lebih besar. Penerapan QRIS dinamis pada 2023-2024 mengakibatkan lonjakan penerimaan PKB yang dramatis, yang diindikasikan oleh kemudahan dan kecepatan transaksi yang mendorong lebih banyak Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran secara digital. Namun, masih terdapat ketidakpastian mengenai seberapa besar kontribusi QRIS dinamis terhadap peningkatan penerimaan, mengingat belum ada pengukuran spesifik yang mengaitkan secara langsung antara penerimaan dan sistem pembayaran.

Evaluasi yang dilakukan Bapenda selama ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada sosialisasi dan promosi opsi pembayaran QRIS kepada Wajib Pajak. Meski demikian, efektivitas sosialisasi dan dampak QRIS dinamis terhadap peningkatan penerimaan PKB belum pernah diukur secara sistematis. Dari perspektif Wajib Pajak, banyak yang merasakan manfaat dari kemudahan, kecepatan, dan

keamanan yang ditawarkan QRIS dinamis. Sistem ini memungkinkan pembayaran tanpa uang tunai, mengurangi risiko kehilangan uang fisik, dan memfasilitasi Wajib Pajak yang berdomisili di luar daerah. Meskipun generasi muda, khususnya Gen Z, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pembayaran digital, tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur, di mana QRIS dinamis baru tersedia di dua lokasi layanan Samsat di Makassar.

Penerapan sistem pembayaran QRIS dinamis di Sulawesi Selatan memberikan perubahan positif dalam cara Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menjadi kerangka yang relevan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi ini, yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Hasil wawancara menunjukkan bahwa QRIS dinamis dianggap lebih bermanfaat dibandingkan metode tradisional, karena meminimalkan kesalahan input data dan mempercepat proses pembayaran. Wajib Pajak merasakan efisiensi yang lebih, menghilangkan kebutuhan untuk antri di kantor Samsat, yang sering kali menyita banyak waktu.

Kemudahan penggunaan juga menjadi faktor penting dalam adopsi QRIS. Proses yang sederhana, di mana pengguna hanya perlu memindai kode QR dan mengonfirmasi pembayaran, membuat QRIS lebih mudah diakses, terutama oleh generasi muda. Namun, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala signifikan, dengan QRIS dinamis yang hanya tersedia di dua lokasi. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak di daerah lain tidak dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS dapat meningkatkan kepatuhan pajak, seperti yang terbukti dalam studi di Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaporkan peningkatan signifikan pada penerimaan pajak daerah.

Secara keseluruhan, untuk mengoptimalkan dampaknya, diperlukan evaluasi berkala, perluasan infrastruktur, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, QRIS dinamis diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian penerapan QRIS dinamis di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan sebelum penerapan QRIS dinamis menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak penggunaan QRIS statis pada 2020. Setelah peluncuran QRIS dinamis pada akhir 2022, terjadi lonjakan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang drastis pada 2023-2024. Ini menunjukkan bahwa QRIS dinamis memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembayaran, mendorong lebih banyak wajib pajak untuk bertransaksi secara digital.

2. Penerapan QRIS dinamis di Sulawesi Selatan telah mengubah cara wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan teori Technology Acceptance Model (TAM), dua faktor utama persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan berperan penting dalam adopsi teknologi ini. Wajib pajak menganggap QRIS dinamis lebih berguna dibandingkan metode tradisional, karena mengurangi kesalahan input dan meningkatkan kepatuhan pajak. Proses pembayaran yang sederhana menjadikannya lebih mudah diakses, terutama oleh generasi muda, meskipun infrastruktur masih menjadi kendala karena sistem ini hanya tersedia di dua lokasi.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Bapenda Sulsel diharapkan melakukan evaluasi rutin terhadap penggunaan QRIS dinamis untuk memahami kontribusinya terhadap penerimaan PKB dan mengevaluasi kepuasan pengguna.
2. Disarankan untuk meningkatkan infrastruktur berupa layar ganda di semua kantor Samsat di Sulawesi Selatan, yang akan memudahkan akses layanan bagi wajib pajak dan meningkatkan pengalaman pengguna.
3. Meningkatkan kampanye sosialisasi melalui berbagai saluran, seperti media sosial, seminar, dan kolaborasi dengan institusi keuangan, untuk memastikan informasi tentang QRIS menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Memperkuat fitur QRIS pada aplikasi pembayaran yang sudah ada, seperti SIGNAL atau Bapenda Sulsel Mobile, untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam melakukan transaksi.
5. Memberikan pelatihan kepada staf Bapenda dan petugas Samsat tentang QRIS agar mereka dapat menjelaskan sistem ini dengan lebih baik kepada wajib pajak, meningkatkan pemahaman dan kepercayaan.
6. Membangun kemitraan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mempromosikan QRIS, serta menyediakan insentif bagi wajib pajak yang menggunakan sistem ini, untuk memperkuat adopsi QRIS.
7. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah faktor lain yang memengaruhi adopsi QRIS, seperti tingkat pendidikan, literasi digital, dan infrastruktur teknologi, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. (2024). *Statistik QRIS*. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. <https://www.aspi-indonesia.or.id/statistik-qris/>
- Azisyah, N., Pontoh, G. T., & Nirwana. (2024). *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Keamanan Terhadap*.

- Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. (n.d.). *Profil Singkat Bapenda Sulsel*. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/bapenda-sulsel/profil-singkat-bapenda-sulsel/>
- Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. (2024a). *Nama Wilayah Makassar 1 dan 2*.
- Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. (2024b). *Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. (2024c). *Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui QRIS*.
- Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. (2025). *Data Jumlah Unit Kendaraan Bermotor 2019-2024*.
- Bank Indonesia. (n.d.). *QRIS*. <https://www.bi.go.id/QRIS/Default.aspx#heading23>. <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#heading23>
- Bank Indonesia. (2019a). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*.
- Bank Indonesia. (2019b). *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*.
- Bank Indonesia. (2022). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 24/11/PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PADG_240122.pdf
- Cahyaning, E. K., & Puspawati, R. A. (2024). *Systematic Literature Review (SLR): Efektivitas Penggunaan QRIS sebagai Alat Transaksi*. 5(2). <https://doi.org/10.30595/ratio.v5i2.21989>
- CNBC Indonesia. (2024). *Bayar Pajak Rumah hingga Parkir Bisa Pakai QRIS di 475 Daerah*. <https://www.cnbcindonesia.com/Market/20240130112532-17-510095/Bayar-Pajak-Rumah-Hingga-Parkir-Bisa-Pakai-Qris-Di-475-Daerah>. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240130112532-17-510095/bayar-pajak-rumah-hingga-parkir-bisa-pakai-qris-di-475-daerah>
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (2019a). *Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (2019b). *Lampiran Siaran Pers NO.21/62/DKom*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/FAQ-QRIS-17082019.pdf>
- Desky, S. S. N. (2023). *Efektivitas Aplikasi Qris Dalam Pelayanan Wajib Pajak Pada Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh*. Singkil. *Skripsi*. http://eprints.ipdn.ac.id/16173/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/16173/1/G1_RE-POSITORI_SILVIA_SAFSA_30.0040.pdf
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue April).

- Hasan, H., & Rifani, R. A. (2022). Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bermobil Dalam Meningkatkan Sistem Layanan Samsat Drive Thru Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat di Kota Makassar. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 1 (01), 33–44.
- Juru, N. A. (2020). Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. 4(2), 408–421.
- Karina, N., & Budiarto, N. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA*, 4(1), 715–722. KBBI Daring Edisi III. (n.d.). Terap. <https://Kbbi.Web.Id/Terap-2>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No Per-27/PJ/2021 Tentang Jenis Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik, Persyaratan Dokumen Elektronik yang Harus dilampirkan, Tanda Tangan Elektronik yang digunakan, Tata Cara Penyampaian Do.
- Nadila. (2024). IMPLEMENTASI PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN BENGKALIS Dosen Pembimbing : Nadila IMPLEMENTATION OF THE USE OF THE QUICK RESPONSE CODE INDO.
- Nofita, A., & Ismanto, S. U. (2024). Penerapan E-Government Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Kota Bandung. 5(8), 3531–3545.
- Nurhadi, Suhaidi, M., & Latip. (2022). IMPLEMENTASI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM PEMBAYARAN UJI KIR KENDARAAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI. 26(2), 557–564. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2007>
- Paramean, E. F. (2024). Implementasi Transaksi Non Tunai Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 6(2), 102–112.
- Paydia. (n.d.). Panduan Penggunaan QRIS & Penjelasan yang Lengkap. <https://Paydia.Id/Panduan-Penggunaan-Qris-Dan-Penjelasan-Yang-Lengkap/>.
- Peraturan Daerah Prov. Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2024. (2024). Pergub Sulsel No 7 Tahun 2023. (2023).
- Septari, I., & Wahyunadi, I. (2024). Effectiveness of QRIS on Motor Vehicle Tax Payment Compliance through the Technology Acceptance Model (TAM) in West Nusa Tenggara. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 07(01), 85–93. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i01-12>
- Taherdoost, H. (2018). A review of technology acceptance and adoption models and theories. *Procedia Manufacturing*, 22, 960–967. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.03.137>
- Tarigan, W. J. (2016). Pengenalan PAJAK INTERNASIONAL (Issue May 2023).
- Tsi, A. (2022). Permudah Pembayaran Pajak, Bapenda Sulsel Hadirkan Qris Dinamis. <https://Bapenda.Sulselprov.Go.Id/v1/2022/12/09/Permudah-Pembayaran-Pajak-Bapenda-Sulsel-Hadirkan-Qris-Dinamis/>. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2022/12/09/permudah-pembayaran-pajak-bapenda-sulsel-hadirkan-qris-dinamis/>

- Tsi, A. (2024). Inovasi Bapenda Sulsel Mendorong Peningkatan PAD. <https://Bapenda.Sulselprov.Go.Id/v1/2024/10/04/Inovasi-Bapenda-Sulsel-Mendorong-Peningkatan-Pad/>. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/10/04/inovasi-bapenda-sulsel-mendorong-peningkatan-pad/>
- UU No. 28 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). In *Ятытат: Vol. ы12у* (Issue 235).
- UU No. 28 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (2009). *UU Nomor 25 Tahun 2009*, 57,3.
- Wahyuni, N. (2016). Education & Training Career Development Job Satisfaction Employee Performance. *Journal of Education and Vocational Research*, 7(1), 14– 20.
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (Issue March). <https://doi.org/10.5281/zenodo.775425>
- Wijayanti, S. N., Ninghardjanti, P., & Susantiningrum, S. (2023). Implementasi sistem pembayaran pajak daerah melalui Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di BPKPD Kabupaten Kebumen. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 7(3), 253. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i3.63599>
- Yunus, A. T., & Ibrahim, F. N. (2023). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep. *Center of Economic Students Journal*, 6(4), 386–397. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/764%0Ahttps://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/download/764/507>